

Abstrak

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomer 11 Tahun 2021, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan semakin derasnya perkembangan zaman secara global, penyelenggaraan pemerintah di Indonesia berubah, ditandai dengan ditandai dengan sistem pemerintahan yang dulu sentralistik dan sekarang menjadi Desentralisasi. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa, peraturan ini dirancang supaya fungsi desa dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat digunakan sebagai tambahan pendapatan desa. Dimana, Dalam hal ini upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintahan Indonesia melalui badan pemerdayaan masyarakat dan pembangunan desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Namun dalam pengelolaan BUMDes memiliki permasalahan yang sering muncul seperti yang terjadi di Desa Alas Rajah yang menjadi faktor utama adalah belum optimalnya pengelolaan aset desa dimana masih rendahnya kompetensi SDM yang ada di desa. Oleh sebab itu banyak amanat dari Peraturan Pemerintah yang tidak diterapkan di Desa Alas Rajah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yaitu dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, yang mana digunakan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana penerapan kerjasama dalam pengelolaan aset desa pada BUMDes Alas Musim dan Bagaimana Efektifitas Penerapan prinsip pengelolaan BUMDes Alas Musim pada Kerjasama antara BUMDes dengan Alas Rajah. Dengan tujuan untuk mengetahui kerjasama yang dilakukan antara BUMDes dengan Desa Alas Rajah yang telah memenuhi prinsip pengelolaan BUMDes yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yang digunakan Kualitatif yang dilakukan dengan wawancara langsung dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah Kepala Desa dan pegawai BUMDes yang diklasifikasikan memiliki hubungan kerjasama dengan BUMDes terdiri dari Sekretaris, dan pegawai lain yang mana melakukan pengoprasian dalam melaksanakan tahapan dalam melakukan pengelolaan aset desa.

Kata Kunci : Pengelolaan Aset Desa, Prinsip BUMDes, Kerjasama

Abstract

According to Article 1 of Government Regulation Number 11 of 2021, a village is a legal community unit that has territorial boundaries, which is authorized to regulate and manage government affairs, the interests of local communities based on community initiatives, legal rights, and/or traditional rights that are recognized and respected in every government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The administration of government in Indonesia is changing, marked by a government system that was once centralized and now becomes Decentralized. In the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 1 of 2016 challenges the management of village assets. This regulation is designed so that village functions can run in accordance with the objectives and can be used as additional village income. Where, in this case, efforts to improve the welfare of the Indonesian government community through community empowerment and village development agencies form a financial entity, namely Village Business Entities (BUMDes). BUMDes are village business institutions managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy and are formed based on the needs and potential of the village. However, in the management of BUMDes there are problems that often arise such as what happened in Alas Rajah Village which is the main factor is not optimal village asset management where there is still low competence of human resources in the village. Therefore, many mandates from Government Regulations are not applied in Alas Rajah Village. This research uses the type of Empirical Juridical research, namely with field research that examines applicable legal provisions, which is used to answer the question of How is the application of cooperation in village asset management at Alas Musim BUMDes and How Effective is the Application of the principles of management of Alas Musim BUMDes in Cooperation between BUMDes and Alas Rajah. With the aim of knowing the collaboration carried out between BUMDes and Alas Rajah Village which has understood the principles of BUMDes management regulated in Government Regulation No. 11 of 2021. The approach taken in this study is a qualitative approach used by direct interviews and legislative approaches. The result of this study is that Village Heads and BUMDes employees who are classified as having a cooperative relationship with BUMDes consist of Secretaries, and other employees who operate in carrying out stages in managing village assets.

Keywords: Village Asset Management, BUMDes Principles, Cooperation